

Implementasi SISKEUDES dan Pengendalian Internal untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

¹*Natalia Sesilia, ²Haryono, ³Djunita Permata Indah

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Korespondensi: b1031231106@student.ac.id

Submit : 19 Mei 2026 | **Diterima** : 01 Agust 2026 | **Terbit** : 28 Agust 2026

ABSTRACT

The increasing complexity of village financial management is directly proportional to the growing risk of budget irregularities. Therefore, strengthening governance through the integration of information technology and internal control systems has become essential to mitigate these risks. This study aims to analyze the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) and its internal control mechanisms in supporting the accountability of financial governance in the Anjungan Dalam Village Government. This research employed a descriptive case study with a qualitative approach. Data were collected through interviews, direct field observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of SISKEUDES has contributed to more structured and systematic village financial management while enhancing transparency and accountability through digital-based financial recording, reporting, and accountability processes. The study also reveals that accountability in village financial management is influenced not only by the utilization of SISKEUDES but also by the effectiveness of an adequate internal control system. This research contributes theoretically by enriching the understanding of the interaction between information technology and internal control in supporting public sector accountability. Practically, the findings provide guidance for village governments to optimize the utilization of SISKEUDES and strengthen internal control practices. Future research is recommended to expand the scope by involving multiple villages with different infrastructure characteristics or by including community members as additional informants.

Keywords: *Accountability; Internal Control; SISKEUDES; Transparency; Village Financial Management*

ABSTRAK

Peningkatan kompleksitas pengelolaan keuangan desa berbanding lurus dengan tingginya risiko penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, penguatan sistemik melalui integrasi teknologi informasi dan pengendalian internal menjadi perangkat penting untuk memitigasi risiko tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) beserta instrumen pengendalian internalnya dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan pemerintahan desa Anjungan Dalam. Melalui metode studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data yang bersumber dari hasil wawancara, pengamatan lapangan secara langsung, serta dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan implementasi SISKEUDES telah membantu manajemen finansial tingkat desa menjadi lebih terstruktur, teratur, serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi melalui proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan berbasis digital. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi melalui SISKEUDES, tetapi juga oleh efektivitas pengendalian internal yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai interaksi teknologi dan pengendalian internal, serta menjadi pedoman taktis bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemanfaatan sistem. Peneliti berikutnya direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup dengan melibatkan beberapa desa yang memiliki karakteristik infrastruktur berbeda atau mengikutsertakan masyarakat sebagai informan tambahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengendalian Internal, SISKEUDES, Transparansi

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memicu perubahan pola dalam pembangunan nasional, yang menempatkan desa bukan lagi sekedar objek pembangunan, tetapi sebagai entitas yang memegang otoritas penuh dalam mengatur pengelolaan keuangan desa secara mandiri. Hal ini selaras dengan langkah pemerintah pusat yang memberikan kewenangan serta dukungan finansial yang signifikan bagi desa guna mengoptimalkan potensi setempat demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rivan & Maksum, 2019). Namun, besarnya otoritas tersebut disertai dengan pemenuhan tuntutan publik akan pemerintah yang bersih dan transparan melalui implementasi good governance serta clean government yang mendorong semua aparatur negara, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola anggaran secara akuntabel (Prawitasari, Nurmalasari, Dewiningrat, & Krismajayanti, 2023). Dalam konteks ini, desa dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara professional, transparan, dan bertanggungjawab melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, keberadaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi pengelolaan keuangan memiliki peranan penting, yang kemudian diperkuat efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada pihak yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat, yang penilaiannya didasarkan pada tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan program kerja dalam upaya merealisasikan berbagai target strategis yang dirancang sebelumnya (Watupelit, Perseveranda, Bibiana, Man, & Manafe, 2022).

Namun, di tengah tuntutan tersebut, pengelolaan keuangan desa menghadapi berbagai kompleksitas. Sistem pelaporan keuangan desa saat ini masih terkendala oleh kurangnya integrasi, masalah dalam pencatatan hingga pertanggungjawaban yang tidak selaras dengan regulasi masih ditemukan di sejumlah desa (Aziva, Nasution, & Atika, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat desa dalam mengoptimalkan penggunaan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan desa berbanding lurus dengan tingginya risiko penyimpangan, sebagaimana terekam dalam laporan yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Data menjabarkan adanya kecenderungan peningkatan kasus korupsi secara berkelanjutan sejak tahun 2015, dengan sektor dana desa menjadi objek yang paling dominan hingga tahun 2021. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa masih rentan terhadap praktik penyimpangan, yang sekaligus mencerminkan belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam memitigasi risiko tersebut.

Sorotan tajam terhadap inefektivitas pengelolaan dana desa berakar pada lemahnya kerangka pengendalian internal yang diterapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peranan strategis dalam menjamin tahapan pengelolaan dana desa, dari tahap perencanaan hingga pada pelaporan, berlangsung secara transparan dan akuntabel, karena kelemahan dalam penerapan SPI berpotensi meningkatkan risiko terjadinya fraud, inefisiensi, serta penyimpangan penggunaan anggaran (Silooy, Talla, & Simanjuntak, 2025). Kondisi ini menuntut adanya penguatan sistemik melalui integrasi teknologi informasi, di mana pemerintah telah menetapkan SISKEUDES sebagai perangkat penting untuk memitigasi risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan standar akuntabilitas publik di desa. Aplikasi SISKEUDES hadir sebagai suatu inovasi berbasis teknologi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menghimpun dan mengelola seluruh tahapan penganggaran, penatausahaan, sampai pada pelaporan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019). Selain itu, implementasi SISKEUDES bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan mengurangi potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana desa melalui penyajian informasi yang lebih kredibel, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Dewi, Yamin, Kamase, Pakawaru, & Erwinsyah, 2025).

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan kondisi di lapangan. Secara konseptual, SISKEUDES dirancang sebagai instrumen berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan pengelolaan keuangan desa. Berbagai studi pada dasarnya mendukung asumsi tersebut, di mana implementasi SISKEUDES yang efektif serta penguatan sistem pengendalian internal terjamin dapat memperkuat akuntabilitas publik pengelolaan keuangan tingkat desa. Penelitian oleh Aziva *et al* (2025) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Bahoras mampu mengoptimalkan tahapan pengelolaan keuangan desa,

dimulai dari perencanaan sampai pada pelaporan, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang diperkuat oleh temuan Prawitasari *et al* (2023) bahwa kualitas pengendalian internal, tingkat transparansi, serta efektivitas implementasi SISKEUDES berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas desa. Selain itu, Polutu, Mattoasi, & Usman (2022) dan Rahmawati, Heriana, Sari, Dewi, & Almas (2023) menegaskan bahwa pengendalian internal yang memadai mampu memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Namun, efektivitas sistem pengendalian internal dapat menurun apabila implementasinya masih lemah, seperti kurangnya kepatuhan, potensi manipulasi sistem, serta ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan lingkungan organisasi, sehingga diperlukan penguatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan (Nugroho, Fahmi, & Astarani, 2024).

Namun demikian, temuan empiris lainnya justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga memperjelas adanya kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan. Sejumlah permasalahan seperti ketidaksesuaian pencatatan, kelemahan pelaporan, serta masih tingginya penyimpangan dana desa mengindikasikan bahwa SISKEUDES belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai alat pengendalian. Argumentasi tersebut selaras dengan temuan empiris yang didokumentasikan dalam studi oleh Mega, Kalangi, & Kapojos (2022) mengungkapkan bahwa penggunaan SISKEUDES justru dapat memberikan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas apabila tidak diperkuat oleh kapasitas sumber daya manusia serta mekanisme pengendalian yang telah berjalan secara optimal. Selain itu dalam penelitian Bagiada & Hadi (2023) dan Selan (2025), kendala teknis, proses manual yang berlangsung, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa juga menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem. Efektivitas sistem pengendalian internal dapat menurun apabila implementasinya masih lemah, seperti kurangnya kepatuhan, potensi manipulasi sistem, serta ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan lingkungan organisasi, sehingga diperlukan penguatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan (Nugroho *et al.*, 2024). Berbagai bukti empiris tersebut menegaskan bahwa keberadaan sistem digital tidak secara otomatis menjamin akuntabilitas tanpa didukung oleh pengendalian internal yang kuat dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual implementasi SISKEUDES dan pengendalian internal diyakini mampu memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, temuan empiris menunjukkan adanya inkonsistensi temuan serta kesenjangan antara harapan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu dianalisis lebih mendalam, terutama terkait bagaimana sinergi antara penerapan SISKEUDES dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam konteks spesifik pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini relevan dilakukan guna mengkaji lebih mendalam implementasi kedua aspek tersebut dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Anjungan Dalam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta menganalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Anjungan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis dengan melalui pengayaan kajian mengenai akuntabilitas keuangan desa, khususnya dalam menyoroti interaksi antara sistem berbasis teknologi dan mekanisme pengendalian internal. Di samping itu, secara praktis studi ini diharapkan dapat memberikan pedoman taktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pemanfaatan SISKEUDES dan memperkuat pengendalian internal sehingga tercipta pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk memahami secara lebih dalam pelaksanaan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Anjungan Dalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam kondisi, proses, serta dinamika yang muncul dalam proses pengelolaan keuangan desa secara nyata dan kontekstual. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada implementasi SISKEUDES, pengendalian internal, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Anjungan Dalam. Objek penelitian meliputi

perangkat desa yang memiliki keterlibatan secara langsung mengelola keuangan desa, dengan informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dokumentasi yang dianalisis berupa Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026. Guna menjaga validitas dan konsistensi data, studi ini mengintegrasikan pendekatan triangulasi dengan memadukan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi secara bersamaan (Sugiyono, 2013). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis di tiga tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Kantor Desa Anjungan Dalam merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan desa dengan mekanisme administratif digital. SISKEUDES di Desa Anjungan Dalam telah mulai digunakan pada tahun 2018 dan terus dimanfaatkan sampai sekarang sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem ini bukan sekedar dimaksudkan untuk memudahkan proses pencatatan administrasi keuangan, tetapi juga untuk mendukung desa mengelola keuangan yang tertib, sistematis, serta akuntabel.

Berdasarkan temuan wawancara dengan bendahara desa, diketahui bahwa seluruh transaksi dan administrasi keuangan desa telah terintegrasi dalam aplikasi SISKEUDES sejak awal penerapannya. Bendahara desa menyampaikan bahwa;

"SISKEUDES sendiri itu sudah digunakan dari 2018 di Kabupaten Mempawah, dan Desa Anjungan Dalam juga sudah menerapkan SISKEUDES ini dari 2018 sekarang, semua data transaksi dan lain-lainnya, semuanya ada diaplikasi siskeudes, terutama untuk transaksi keuangan desa".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SISKEUDES bertransformasi sebagai instrumen utama pada proses mengelola keuangan desa, khususnya dalam pencatatan, transaksi, penyusunan laporan, dan pengarsipan data keuangan.

Implementasi SISKEUDES di Kantor Desa Anjungan Dalam juga telah mendukung sebagian besar proses pengelolaan keuangan, dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan terakhir pelaporan keuangan desa. Bendahara menjelaskan bahwa proses laporan dan perencanaan keuangan desa telah dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh bendahara desa;

"iya, semuanya. Dari laporan perencanaan, semuanya sudah di SISKEUDES".

Meskipun implementasi SISKEUDES telah diterapkan secara aktif pada pengelolaan keuangan desa, proses penerapannya belum sepenuhnya mencakup seluruh dokumen administrasi desa. Berdasarkan wawancara dengan sekertaris desa, diketahui bahwa beberapa dokumen perencanaan seperti RKP dan RPJMDes masih disusun secara manual, sedangkan APBDes telah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Sekretaris desa menyampaikan bahwa;

"Untuk perencanaan APBDes nya pakai SISKEUDES, kalau untuk RKP, RPJMDesm, nah itu manual."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Kantor Desa Anjungan Dalam masih berlangsung secara bertahap. Meskipun sebagian besar pengelolaan keuangan telah terintegrasi dalam sistem digital, beberapa administrasi perencanaan desa masih dilakukan secara manual sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme administrasi desa yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan SISKEUDES di Kantor Desa Anjungan Dalam juga menghadapi beberapa kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan internet. Ketiga narasumber yang diwawancarai secara umum menyampaikan bahwa hambatan utama dalam penggunaan SISKEUDES berasal dari gangguan jaringan dan akses internal yang kurang stabil. Kepala desa menjelaskan bahwa kondisi jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat proses penyelesaian administrasi keuangan desa.

"Palingan persoalannya kadang-kadang, bahasa kampungnya lelet, ya sedikit gangguanlah, gangguan jaringan, jadi kita tidak bisa kalau jaringan udah gangguan, naj sulit kadang, kadang-kadang berhari-hari itu."

Kondisi tersebut menyebabkan aparat desa harus mencari alternatif lain agar pekerjaan administrasi tetap dapat diselesaikan. Kepala desa juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu bendahara dan sekretaris desa harus bekerja di luar kantor desa untuk

mendapatkan jaringan internet yang lebih baik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sistem, SISKEUDES dinilai cukup membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet di wilayah desa. Gangguan jaringan dan error sistem menjadi tantangan teknis yang cukup memengaruhi kelancaran proses input data dan pelaporan keuangan desa.

Selain kendala teknis, implementasi SISKEUDES juga dihadapkan pada hambatan administratif dalam proses pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menjelaskan bahwa sebelumnya proses pencairan dan persetujuan administrasi keuangan desa sering mengalami keterlambatan karena proses pengelolaan dilakukan secara terintegrasi pada tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan desa yang telah menyelesaikan laporan tetap harus menunggu desa lain dalam proses pencairan anggaran.

"Kadang persoalannya, desa kita sudah laporan dengan baik semua, sudah di acc semua, ada beberapa desa yang agak lama proses mereka, ini kendalanya."

Namun demikian, kepada desa juga menjelaskan bahwa sistem tersebut mengalami perubahan pada tahun 2026, di mana desa yang telah menyelesaikan laporan penganggaran dapat langsung diproses tanpa harus menunggu desa lainnya. Perubahan tersebut dinilai membantu proses administrasi dan pencairan dana desa.

Selain implementasi SISKEUDE, pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Anjungan Dalam juga didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal diterapkan melalui pembagian tugas, proses verifikasi, otorisasi transaksi, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prosedur, juga dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari adanya pemisahan fungsi antar aparat desa sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Bendahara desa menjelaskan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang mengajukan kegiatan, pihak yang melakukan verifikasi, dan pihak yang mencairkan anggaran.

"Kalo keuangan desa otomatis yang mengelola kaur keuangan dan atas verifikasi sekretaris desa. Tapi dalam belanja, yang meminta permintaan belanja itu kasi."

Pemisahan fungsi tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pembagian tugas, proses pengendalian internal juga dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan sebelum pencairan anggaran dilakukan.

Bendahara desa menjelaskan bahwa sebelum pencairan anggaran dilakukan, terlebih dahulu melalui Surat Perintah Pencairan (SPP) dan proses verifikasi oleh sekretaris desa.

"Sebelum pencairan anggaran itu ada SPP. Jadi diajukan dulu ke sekretaris desa untuk memverifikasi apakah belanja ini boleh dilakukan atau dicairkan."

Sekretaris desa juga menjelaskan bahwa proses pencairan anggaran dilakukan melalui sistem persetujuan berlapis yang melibatkan sekretaris desa dan kepala desa sebagai pengawas guna memastikan administrasi desa berjalan sesuai prosedur. Penerapan mekanisme verifikasi dan otorisasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Anjungan Dalam tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses pemeriksaan dan persetujuan terlebih dahulu sebelum anggaran direalisasikan.

Selain itu, proses pemeriksaan data keuangan juga dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Kepala desa menegaskan bahwa seluruh data keuangan wajib diperiksa terlebih dahulu. Sekretaris desa juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran harus disesuaikan terlebih dahulu dengan hasil musyawarah desa dan APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Dan APBDes catat di SISKEUDES, nanti dicocokkan, nah itu yang akan dipergunakan, tidak sembarangan digunakan."

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah beserta perencanaan yang telah disepakati bersama, agar penggunaan anggaran tidak dilakukan di luar ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengawasan juga melibatkan kerja sama masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Kepala desa menjelaskan bahwa pemerintah desa secara rutin mempublikasikan informasi anggaran desa melalui baliho dan media sosial agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa.

"Makanya ada plang (baliho) anggaran setiap tahun itu wajib dipasang dan masyarakat harus tau"

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menunjukkan adanya upaya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pengawasan dari perangkat desa, pengawasan eksternal dari masyarakat juga menjadi bagian krusial untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan SISKEUDES yang didukung dengan penerapan sistem pengendalian internal dinilai membantu menciptakan keuangan desa yang lebih tertib serta dapat dipertanggungjawabkan. bendahara desa mengatakan bahwa penggunaan SISKEUDES membuat proses pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih jelas dan terkoordinasi.

"Iya, saya sangat terbantu karena adanya aplikasi SISKEUDES, istilahnya pertanggungjawaban itu terkoordinir dari atas sampai bawah, lebih jelas, dan lebih mudah, efisienlah kerjanya"

Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris desa yang menilai bahwa SISKEUDES sangat membantu desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai prosedur yang berlaku.

"SISKEUDES ini sangat membantu bagi desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran."

Secara keseluruhan, implementasi SISKEUDES dan penerapan sistem pengendalian internal di Kantor Desa Anjungan Dalam menunjukkan adanya upaya mewujudkan pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis, teratur, transparan, dan akuntabel. Meskipun masih ditemukan kendala teknis maupun administratif, keberadaan sistem digital, mekanisme verifikasi, pembagian tugas, serta pengawasan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pembahasan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Anjungan Dalam menunjukkan adanya transformasi pengelolaan keuangan desa menuju sistem administrasi berbasis digital yang lebih terstruktur dan akuntabel. Penggunaan SISKEUDES sejak tahun 2018 memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyesuaikan tata kelola keuangan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses transaksi, pencatatan, hingga pelaporan keuangan desa sebagian besar telah terintegrasi dalam aplikasi SISKEUDES. Kondisi ini memperkuat pandangan Elfira & Putri (2024) bahwa SISKEUDES berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang mampu mendukung pengelolaan keuangan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban. Lebih lanjut lagi, keberadaan sistem digital juga memperlihatkan adanya upaya pemerintah desa dalam meminimalisasi kesalahan administrasi dan meningkatkan keteraturan pengelolaan keuangan. Dalam perspektif akuntabilitas publik, penggunaan SISKEUDES menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Aziva *et al* (2025) dan Prawitasari *et al* (2023) yang menyatakan implementasi SISKEUDES berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, studi ini juga menemukan bahwa implementasi di Desa Anjungan Dalam belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh karena beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKP masih disusun secara manual. Temuan tersebut membuktikan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa masih berlangsung secara bertahap juga belum sepenuhnya mampu menggantikan mekanisme administrasi konvensional. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterbatasan implementasi sistem sehingga secara konseptual penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi efektivitas SISKEUDES dalam mendukung akuntabilitas, tetapi juga memperluas pemahaman bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tingkat desa dipengaruhi oleh kesiapan administratif serta kemampuan adaptasi organisasi pemerintahan desa itu sendiri.

Di sisi lain, efektivitas implementasi SISKEUDES juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kapasitas aparatur desa dalam mengoperasikan sistem tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penggunaan SISKEUDES adalah gangguan jaringan internet dan hambatan teknis sistem yang menyebabkan keterlambatan proses input data maupun pelaporan keuangan desa. Dalam kondisi tertentu, aparatur desa bahkan harus mencari lokasi dengan akses jaringan yang lebih baik agar proses

administrasi tetap dapat berjalan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital di pemerintahan desa tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan aplikasinya melainkan juga pada dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan ini konsisten dengan penelitian Bagiada & Hadi (2023) serta Selan (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan jaringan, hambatan teknis, dan proses administrasi yang masih berlangsung secara manual menjadi faktor penghambat optimalisasi SISKEUDES di tingkat desa. Selain itu, hambatan administratif yang sebelumnya terjadi akibat sistem pencairan anggaran yang terintegrasi di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh koordinasi birokrasi antar pemerintah. Perubahan kebijakan pada tahun 2026 yang memungkinkan desa memproses pencairan anggaran secara lebih mandiri menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem administrasi yang lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan desa. Secara teoritis, kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tata kelola keuangan tidak dapat dipahami semata sebagai proses teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi SISKEUDES masih menghadapi tantangan struktural yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normative digitalisasi pemerintahan desa dengan realitas operasional di lapangan.

Selain implementasi sistem digital, penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki peranan yang besar dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penerapan pengendalian internal di Kantor Desa Anjungan Dalam terlihat melalui adanya pembagian tugas, mekanisme verifikasi, dan mencairkan anggaran menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal untuk meminimalisasi risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini selaras dengan konsep Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya pengendalian dalam menjamin keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, penelitian Rahmawati *et al* (2023) dan Polutu *et al* (2022) juga menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat mampu meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan bukan hanya dilakukan aparat desa, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat melalui publikasi anggaran desa menggunakan baliho dan media sosial. Keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi mekanisme penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Keberadaan SISKEUDES yang didukung oleh pengendalian internal dan pengawasan masyarakat pada akhirnya membantu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi memerlukan sinergi antara sistem digital, pengendalian internal yang efektif, serta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Anjungan Dalam menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital telah membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib, sistematis, transparan, juga akuntabel. SISKEUDES telah digunakan dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, meskipun beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKP masih disusun secara manual. Dalam pelaksanaannya, implementasi SISKEUDES masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan jaringan internet dan hambatan sistem yang memengaruhi proses administrasi dan pelaporan keuangan desa. Studi ini juga menunjukkan jika sistem pengendalian internal memiliki peranan strategis dalam menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pembagian tugas, mekanisme verifikasi, otorisasi pencairan anggaran, serta pengawasan dari masyarakat melalui publikasi informasi anggaran desa. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi melalui SISKEUDES, tetapi juga oleh efektivitas pengendalian internal, kesiapan aparat desa, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SISKEUDES dan pengendalian internal merupakan fenomena yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami secara linier. Temuan penelitian tidak hanya mengonfirmasi asumsi teoritik mengenai pentingnya sistem digital dan pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas, tetapi juga memperluas pemahaman bahwa efektivitas implementasi sistem sangat dipengaruhi oleh kondisi administratif, birokrasi, infrastruktur, serta dinamika sosial pada lingkungan pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi teoritik dalam memperkaya kajian

terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait hubungan antara digitalisasi tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengendalian internal dalam konteks pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah keterbatasan yang memengaruhi ruang lingkup hasil penelitian. Penelitian hanya difokuskan pada satu desa, yaitu Kantor desa Anjungan Dalam, sehingga temuan-temuan bersifat kontekstual dan belum memungkinkan digeneralisasikan pada seluruh pemerintahan desa dengan karakteristik berbeda. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada aparatur desa yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan keuangan, sehingga sudut pandang masyarakat sebagai pihak penerima layanan dan pengawas eksternal belum tergambarkan secara mendalam.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan secara lebih operasional dalam mendukung optimalisasi implementasi SISKEUDES dan pengendalian internal pada pemerintah desa. Pemerintah desa disarankan untuk menetapkan prosedur cadangan operasional ketika terjadi gangguan jaringan internet, seperti penyusunan format input offline sementara yang dapat langsung disinkronkan ke SISKEUDES setelah jaringan kembali stabil agar keterlambatan proses administrasi tidak terus berulang. Selain itu, pemerintah desa perlu membuat jadwal pemeriksaan administrasi keuangan secara berkala setiap akhir bulan yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa melalui checklist verifikasi sederhana terhadap kesesuaian dokumen, realisasi anggaran, dan bukti transaksi. Mekanisme ini dapat membantu meminimalisasi kesalahan administrasi yang sering baru ditemukan pada tahap evaluasi akhir. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan beberapa desa yang memiliki karakteristik wilayah, kapasitas aparatur, dan kondisi infrastruktur yang berbeda agar diperoleh temuan yang lebih komprehensif terkait implementasi SISKEUDES dan pengendalian internal dalam upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Peneliti berikutnya juga dapat melibatkan masyarakat sebagai informan tambahan untuk menggali perspektif pengawasan eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Aziva, Z., Nasution, Y. S. J., & Atika, A. (2025). Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Desa pada Kantor Nagari Bahoras. *Journal of Economics and Management Scienties*, 720–729. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.210>
- Bagiada, P. P., & Hadi, M. (2023). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 278–289. <https://doi.org/10.46880/jmika.vol7no2.pp278-289>
- Dewi, N. S. K. E. S., Yamin, N. Y., Kamase, H. P., Pakawaru, M. I., & Erwinsyah. (2025). Accountability of village funds: Through competence and SISKEUDES, supervision moderation and leadership style. *Journal of Contemporary Accounting*, 7(3), 209–225. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss3.art5>
- Dihni, V. A. (2022, 19 April). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c15f8421b6caa37/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Elfira, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.214>
- Indonesia Corruption Watch. (2018, 19 Februari). *Outlook Dana Desa 2018: Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. Retrieved from <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>
- Mega, K. N., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/42490>

- Nugroho, A., Fahmi, M., & Astarani, J. (2024). Faktor-Faktor Internal terhadap Pencegahan Fraud di BUMDES dengan Variabel Moral Sensitivity sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 74–83. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6769>
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntabilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78. Retrieved from <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
- Prawitasari, P. P., Nurmalasari, M. R., Dewiningrat, A. I., & Krismajayanti, N. P. A. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa. *Syntax Idea*, 5(12), 2454–2470. Retrieved from <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2701>
- Primayogha, E. (2018, 14 Agustus). *Lonjakan Korupsi di Desa*. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/ian.v9i2.2487>
- Selan, D. D. (2025). *The Role of SISKEUDES in Enhancing Accountable and Transparent Village Financial Governance*. (03), 450–462.
- Silooy, R. W., Talla, A., & Simanjuntak, P. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Komitmen Organisasi Dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8047–8061. Retrieved from <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/ekoma>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Watupelit, R. K. D., Perseveranda, M. E., Bibiana, R. P., Man, S., & Manafe, H. A. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten kupang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 4(2), 497–515. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>